

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Layanan Penetapan Status Penggunaan (PSP)
Barang Milik Negara (BMN)



Subbag. Tata Usaha dan Barang Milik Negara (BMN)

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/06-06
Judul Dokumen	: Layanan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN)	Revisi	: 00
Standar	: Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Tata Usaha & BMN	Jlh Hal	: 4

Layanan Penetapan Status Penggunaan (PSP)
Barang Milik Negara (BMN)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Muhammad Iqbal, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara		25/11/2019
2. Pemeriksaan	Hernita, SE	Ka. Subbag. Tata Usaha dan (BMN)		25/11/2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom., S.Cs	Wakil Direktur II		26/11/19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT.	Ka. P4M		27/11-19

A. Tujuan

Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN adalah suatu bentuk surat keputusan dari Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan pendelegasian sebagian kewenangan untuk menetapkan kewenangan penggunaan BMN yang berada dan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe dibawah kemenristekdikti atau dalam kata lain merupakan pernyataan terhadap kewenangan untuk menggunakan dan melaksanakan tanggung jawab pengelolaan BMN terhadap BMN yang telah ditetapkan status penggunaan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pengelola Barang.

B. Ruang Lingkup

1. Tanah dan/atau bangunan.
2. Barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan.
3. Barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25 juta per unit/satuan.

C. Referensi

1. PMK No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD
2. PMK No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN
4. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 ttg. Penatausahaan BMN.
6. Peraturan Menteri No. 97/PMK.06/2007 ttg Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
7. Permenpan-RB No. 25 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
8. Permenristekdikti No. 71 Tahun 2017 ttg Pedoman Penyusunan SOP
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah